

PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

Oleh :

Andi Nurul Oktaviani, S.M¹

Dr. Ismail Badollahi, S.E., M.Si., Ak., CA²

Asrawan, S.E., M.M³

Universitas Muhammadiyah Makassar^{1, 2}

Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa³

Alamat : Lembang Parang, Kec. Barombong, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan (90225).

Korespondensi Penulis : andinuruloktaviani@gmail.com

Abstract. *The Influence of Competence and Information Systems on the Regional Financial Accountability of Barru Regency. This study aims to determine the effect of competency on regional financial accountability in Barru District and to determine the effect of information systems on regional financial accountability in Barru District. The type of research used in this research is a quantitative approach with a sample of 40 respondents. Data collection techniques using questionnaire techniques. The data analysis technique uses multiple linear regression tests. The results of the study show that competence and information systems have a positive and significant effect on the regional financial accountability of Barru Regency.*

Keywords: *Competence, Information Systems, Financial Accountability.*

Abstrak. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Informasi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Barru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Barru dan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 40 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan Daerah Kabupaten Barru.

Kata Kunci: Kompetensi, Sistem Informasi, Akuntabilitas Keuangan.

LATAR BELAKANG

Maraknya kasus temuan BPK atas penyalahgunaan laporan keuangan yang berlanjut hingga saat ini berdampak pada tingginya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas keuangan pemerintah sehingga memicu diterbitkannya INPRES No 7 tahun 1999, paket perundangan pengelolaan keuangan negara yaitu uu 17 tahun 2003, uu 1 tahun 2004 serta peraturan perundangan turunannya. Paket aturan tersebut terdiri dari aturan dalam menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) serta laporan keuangan yang komprehensif yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap periode pelaporannya. Diberlakukannya seperangkat kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan peran daerah dalam mengelola semua aspek keuangan daerah menciptakan citra pemerintahan yang bersih/*Good governance* (ririh dan lilis, 2017). *Good governance* merupakan penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang terpadu dan akuntable yang selaras dengan prinsip demokrasi, efisiensi pasar, penangkalan korupsi, berdasarkan pada anggaran dan penegakan kerangka hukum dan politik untuk menciptakan suasana kondusif yang menumbuhkan citra pengelolaan pemerintah yang baik dalam meningkatkan iklim usaha bagi pihak swasta (sumarto hetifa sj, 2003:1).

Good governance dapat dikatakan pula sebagai seperangkat sistem dari suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang komprehensif untuk meningkatkan kepercayaan *public*. Menurut ihyaul ulum (2010:31), *Good governance* ditopang oleh tiga pilar utama yaitu prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip utama tersebut, seharusnya menjadi landasan operasional yang ideal bagi para pejabat *public* untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersih di berbagai daerah Indonesia. Namun faktanya prinsip tersebut masih belum sepenuhnya dapat dipraktikkan dengan baik,

karena sampai saat ini masih terdapat temuan BPK terhadap laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Menurut ketua BPK RI Firman Agung Sampurna: hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat 7.868 temuan dari 13.567 permasalahan, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp8,97 triliun,".

Fakta-fakta tersebut menunjukkan pemerintah pusat maupun daerah belum mampu melaksanakan prinsip akuntabilitas keuangan dengan baik. Akuntabilitas merupakan istilah lain dari pertanggungjawaban (Indra dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap pengelolaan & pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik. Selanjutnya Ihyaul Ulum (2010:31) menyatakan akuntabilitas keuangan merupakan melaporkan aktivitas pelaporan keuangan pemerintah mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban atas penguasaan dan penggunaan dana-dana yang dipercayakan untuk dikelola pada pihak tertentu. Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu komponen utama dalam mewujudkan praktik *Good governance*. Ihyaul Ulum (2010:41) berpendapat bahwa akuntabilitas keuangan harus ditopang oleh tiga komponen utama diantaranya integritas keuangan, pengungkapan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan *Good governance* dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih. Terselenggaranya *Good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Menurut Sedarmayanti (2003 : 2) perlu diperhatikan pula mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Pada dasarnya terdapat tiga pilar utama didalam mewujudkan *Good governance*, yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Untuk itu

PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Penggunaan indikator kinerjanya sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Seiring dengan itu pp 105 tahun 2000 mensyaratkan pula pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan (neraca daerah, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran). Salah satu alat yang dipergunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data keuangan adalah rasio, karena dapat menunjukkan hubungan antara data-data keuangan yang akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan. Mengingat pentingnya menganalisis laporan keuangan dalam suatu pemerintahan, yang bertujuan untuk penyusunan rencana yang lebih baik, penentuan kebijakan yang lebih tepat, serta untuk mengetahui tingkat kinerja, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis rasio keuangan APBD.

Tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan oleh masing-masing daerah. Untuk menilai kinerja digunakan ukuran penilaian yang didasarkan pada indikator sebagai berikut : *input* (masukan) yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan. *Output* (keluaran) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. *Outcome* (hasil) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif dan efisien (Mardiasmo, 2002:121).

Kabupaten Barru adalah salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi sumber daya yang besar, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 9 tahun 2009, tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi

Sulawesi Selatan tahun 2009-2013, Kabupaten Barru ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penetapan Kabupaten Barru sebagai kek, merupakan peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Barru karena dalam pengembangannya didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Barru.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat pada tahun 2001, Kabupaten Barru memikul tugas untuk memberikan suatu inovasi di dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri didalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintahan pusat bahkan kepada masyarakat Kabupaten Barru sendiri.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan pihak luar dalam pengembangan beberapa komoditas pertanian seperti kerjasama pemerintah Kabupaten Barru dengan pemerintah australia barat (perth) untuk pengembangan komoditas kentang dan Provinsi yunan (rrc) untuk komoditas kacang tanah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru juga mengalami peningkatan yang positif selama beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2010, laju pertumbuhan pdrb Kabupaten Barru sebesar 6,98%, yang pada tahun 2009 hanya 4,94%. Hal ini disebabkan adanya kemajuan dan peningkatan yang signifikan dari sektor ekonomi pendukung, khususnya dari sektor primer, yaitu sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan. Selain sektor tersebut, sektor pendukung sekunder seperti sektor pembangunan dan jasa juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dengan berkembangnya sektor-sektor tersebut, maka semakin terbuka lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja sehingga pengangguran yang ada di Kabupaten Barru akan semakin berkurang.

Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut menuntut pemerintah Kabupaten Barru untuk dapat menerapkan pemerintah yang berorientasi kepada adanya budaya dan etos kerja yang tinggi dan pencapaian hasil serta pertanggungjawaban menuju *Good governance*. Dengan demikian akan terwujud pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari pengaruh korupsi, kolusi, dan nepotisme.

PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

TINJAUNA PUSTAKA

1. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang berhubungan tentang cara untuk memperoleh, mengalokasikan, menggunakan dana organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengendalikan pencarian dana dengan biaya serendah- rendahnya dan menggunakannya secara baik dan tepat untuk kelangsungan operasi organisasi (Weston dan Brigham (1984:3) dalam Utari, Purwanti, dan Prawironegoro, 2014:3).

Menurut Mustafa (2017:3) Manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen.

Berdasarkan dari teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah penggabungan ilmu dan seni dengan cara merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan.

2. Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi utama dalam manajemen keuangan adalah mengambil keputusan yang mencakup semua perusahaan dalam memperoleh dan mengalokasikan dana tersebut.

Ada beberapa fungsi manajemen keuangan menurut Suad dan Enny (2015:7) sebagai berikut:

- a) Penggunaan dana (Keputusan Investasi).
- b) Memperoleh dana (Keputusan Pendanaan).
- c) Pembagian laba (Kebijakan Dividen).

3. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan untuk memastikan pengelolaan dana organisasi yang efektif. Dalam pengelolaan keuangan dipastikan akan terdapat perbedaan namun tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, perlu diperhatikan agar setiap instansi pemerintah harus lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil langkah yang tepat untuk perbaikan dan pembaharuan dalam sistem yang sudah ditetapkan berdasarkan keadaan, dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud.

4. Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) dalam bentuk kontrak kerjasama yang disebut “*nexus of contract*”. Purnamasari & Handayani (2015), dalam teori keagenan (*agency theory*), masalah agensi muncul ketika hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Masalah keagenan pada pemerintahan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana merekamampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah Daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan (Purnamasari & daerah Handayani, 2015).

5. Kompetensi

a) Pengertian Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan saat bekerja secara produktif dengan orang lain dan lingkungan mereka. Kata kunci yang berkaitan dengan kerja produktif menunjukkan adanya unsur produk kerja. Oleh karena itu, kemampuan memiliki indikator produktivitas kerja

PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kemampuan suatu keadaan pada seseorang secara penuh kesanggupan, berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan suatu yang optimal. Kemampuan kerja “suatu unsur dalam kematangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan suatu pengalaman”’. (Toha, 2003) dalam Sedarmayanti (2017:21).

Menurut (Spencer dan Spencer 1993) dari Sedarmayanti (2017:22), kemampuan adalah karakteristik mendasar dari seorang individu dan secara kausal terkait dengan kinerja yang efektif atau sangat tinggi yang terkait dengan kriteria dalam melakukan aktivitas. Kemampuan adalah bagian dari kemampuan seseorang untuk bertahan hidup dan memprediksi situasi dan perilaku yang lebih luas di tempat kerja.

Menurut Moekijat, (1887) dalam Sedarmayanti (2017:21) kompetensi adalah gambaran kesanggupan yang telah ada untuk melaksanakan bermacam-macam tugas yang diperlukan oleh suatu pekerjaan tertentu, berupa keterampilan dan kecakapan yang dimiliki oleh seorang individu, sehingga orang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan bermacam-macam tugas yang diperlukan dalam suatu pekerjaan tertentu

b) Tipe Kompetensi

Tipe karakteristik menurut Spencer dan Spencer dalam Putri (2017:22-23) sebagai berikut:

- 1) **Motif:** sesuatu yang secara konsisten dipikirkan/diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan/tujuan tertentu.
- 2) **Sifat:** karakteristik fisik dan *respons* yang konsisten terhadap situasi/informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi pilot tempur.
- 3) **Konsep diri:** sikap, nilai/citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.
- 4) **Pengetahuan:** informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik.

Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks skor pada teks pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal mengukur pengetahuan dan keterampilan dengan cara sebenarnya digunakan dalam pekerjaan.

- 5) Keterampilan: kemampuan mengerjakan tugas fisik/mental tertentu, kompetensi mental/keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis konseptual

c) Dimensi Kompetensi

Menurut Moherinto (2012) dalam Pramularso (2018:42) secara rinci terdapat lima dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh semua individu, adalah sebagai berikut:

- 1) *Task skills*, yaitu keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan standar ditempat kerja.
- 2) *Task management skills*, yaitu keterampilan untuk mengolah serangkaian tugas yang berbeda yang muncul dalam pekerjaan.
- 3) *Contingency management skills*, yaitu keterampilan mengambil tindakan yang ceap dan tepat bila timbul suatu masalah dalam pekerjaan.
- 4) *Job role environment skills*, yaitu keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja.
- 5) *Transfer skills*, yaitu keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru

d) Indikator Kompetensi

Berikut indikator kompetensi menurut hasil penelitian terdahulu Oklivia dan Marilnah (2014) adalah:

1) Mutu Personal

Mutu personal yang baik yang harus dimiliki dalam menjalankan tugasnya seperti, rasa ingin tahu, berpikir luas, mampu menangani ketidakpastian, mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif dan mampu bekerja sama dengan tim.

2) Pengetahuan Umum

PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

Seorang harus memiliki pengetahuan umum seperti pengetahuan dasar untuk mereview analisis, pengetahuan teori, pengetahuan untuk memahami entitas yang akan membantu pelaksanaan.

3) Keahlian Khusus

Keahlian khusus yang harus dimiliki antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, keterampilan menggunakan komputer, serta mampu menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

6. Sistem Informasi

a. Pengertian Sistem Informasi

Entitas memiliki hubungan input yang memproses dan mengungkapkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan pemantauan di kemudian hari. Pasti ada keterkaitan antar pekerjaan di masing-masing departemen perusahaan, jika pengelolaan di perusahaan masih diatur secara manual tanpa menggunakan sistem informasi, maka dapat dikatakan pekerjaan staf karyawan di departemen ini tidak efektif. Karena dengan berkembangnya waktu, hal-hal yang secara teknis dimungkinkan dalam jangka waktu yang lebih lama semua dimungkinkan oleh teknologi. Sistem informasi dapat dipahami sebagai alat bantu bagi pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya secara akurat, efisien dan efektif.

Menurut (Sholeh & Wahyudin, 2021) sistem informasi adalah proses komunikasi di mana informasi dimasukkan, dicatat, disimpan, dan diambil untuk keputusan perencanaan, operasional, dan pemantauan. Sedangkan menurut (Sinaga et al., 2020) sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bagian-bagian terstruktur yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen bisnis. Menurut (Hakim, 2019), sistem informasi adalah sebuah mesin atau sistem manusia yang menyediakan informasi untuk mendukung aktivitas manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Sistem informasi juga dapat didefinisikan sebagai manajemen dalam mengumpulkan data dan menyajikan informasi yang

mendasari keputusan perusahaan.

b. Indikator Sistem Informasi

Menurut (Sholeh & Wahyudin, 2021) indikator sistem informasi adalah:

- 1) Akurasi, informasi harus benar.
- 2) Tepat Waktu, informasi harus tepat waktu pada saat dibutuhkan.
- 3) Sesuai, informasi harus sesuai dengan yang diminta.
- 4) Lengkap, informasi yang diberikan harus lengkap dan pengguna dapat menerima informasi yang menyajikan gambaran lengkap dari suatu masalah tertentu.

7. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2010) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas adalah amanah/agent/Pemerintah Daerah dan pegawainya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas yaitu kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Pertanggungjawaban dana publik;
- b) Penyajian tepat waktu; dan
- c) Adanya pemeriksaan (*audit*) respon pemerintah.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholder yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk

PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakanseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban (Bastian, 2006:385).

a. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (Vince & Rheny, 2015). Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009).

Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Menurut Nordiawan (2010), tujuan penyajian laporan keuangan adalah: (1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, (2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan, (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dayaekonomi yang digunakan, (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber penerimaannya, dan (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitaspelaporan.

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Menurut Bastian (2006), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat, dan (4) Dapat dipahami.

b. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Christy & Heni, 2014). Menurut Bandariy (2011) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Menurut (Alnur, 2016) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Menurut Mardiasmo (2009; 171), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggung jawaban publik. Pertanggung jawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggung jawaban dan pengelolaan (*accountability & stewardship*).

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah. Masyarakat menerangkan pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga dan kualitas pelayanan yang diberikan (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 pasal 232, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan, pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

Menurut Halim (2008) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Prosedur yang dimaksud adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu entitas.

d. Indikator Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengamplikan serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Indikator dari akuntabilitas adalah:

- 1) Akuntabilitas Kejujuran, yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dan publik.
- 2) Akuntabilitas Proses, yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi, akuntabilitas proses termanifestasikan

melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsif, dan murah biaya.

- 3) Akuntabilitas Program, yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak ada apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas Kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

PENELITIAN TERDAHULU

Tinjauan empiris merupakan salah satu bagian indikator dalam persyaratan karya tulis ilmiah dimana didalam tinjauan empiris menjelaskan tentang hasil penulisan karya tulis ilmiah terdahulu, sebagai salah satu penarikan interpretasi dari karya ilmiah dan berfungsi sebagai landasan untuk memperoleh hasil penulisan karya tulis ilmiah yang relevan dan objektif maka dari itu tinjauan empiris sebagai berikut:

No	Nama penelitian dan Tahun penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Eko Setyanto Dan Hamzah Ritchi (2018)	Faktor faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Independen: Kompetensi aparatur, kualitas software SIA, penerapan SPI, Penerapan SAP. Independen: Akuntabilita	SPSS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, kualitas <i>software</i> sistem informasi akuntansi, penerapan pengendalian intern berpengaruh terhadap semua variabel independen

**PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BARRU**

					secara simultan dengan akuntabilitas keuangan termasuk dalam kriteria hubungat sangat kuat.
2.	Made Bagus Febrianto, Gede Adi Yuniarta, Edy Sujana (2017)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas keuangan pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bangli	Akuntabilitas keuangan	SPSS 24.0	Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas keuangan terdiri dari (1) komponen faktor 1 dengan nama kewajaran penyajian laporan keuangan terdiri dari keseuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, keterbatasan sistem informasi, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan pada perundang-undangan: dan (2)

					komponen faktor 2 dengan nama tata kelola pemerintah yang baik terdiri dari kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan
3.	Alwina Noviana dan Decky Hendarsyah (2020)	Ketetapan waktu pelaporan keuangan: Sistem pengendalian internal dan sistem informasi pengelolaan Keuangan daerah.	Independen: sistem pengendalian internal, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Dependen : Ketetapan waktu pelaporan keuangan	SPSS	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara persial dan simultan Sistem pengendalian internal dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap ketetapan waktu pelaporan keuangan pada dinas perhubungan kabupaten bengkalis.
4.	Herda marlin Ala (2020)	Faktor faktor yang mempengaruhi keterandalan	Independen: kualitas sumber daya, pemanfaatan	SPSS	Hasil peneilitian ini menunjukkan kapasitas sumber daya manusia,

**PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BARRU**

		pelaporan keuangan daerah kota kupang	teknologi, dan pengendalian intern Dependen: keterandalan pelaporan keuangan		pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah Kota kupang
5.	Ni Luh Wulan Aritini dan I Putu Deddy Samtika (2019)	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah akseibilitas laporan keuangan dan sistem	Independen: penyajian laporan keuangan, akseibilitas laporan	SPSS 21	Hasil penelian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
6.	Pancawati Herdaningsih, Rachmawati Meita O, Ceacili Srimindarti dan Ida Kristiana (2019)	Determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi Kasus pada pemerintah Daerah kabupaten Pernalang)	Independen: Penyajian laporan keuangan, <i>Value For Money</i> , Sistem pengendalian intern, akseibilitas laporan keuangan.	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian intern dan akseibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

			Dependen: Akuntabilitas pengelolaan keuangan		pelaporan keuangan daerah. Tetapi nilai uang tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
7.	I Wayan Aditya paramarta dan Dodik Ariyanto (2021)	Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas laporan keuangan daerah dengan kualitas informasi sebagai variabel mediasi	Independen: Sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya Dependen: Akuntabilitas laporan keuangan daerah.	Analisis jalur	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.
8.	Rianti (2021)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Di	Dependen: Sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah	SPSS Versi 24	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi

**PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BARRU**

		kabupaten takalar	Dependen: Kualitas laporan keuangan.		berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
9.	Suci Anggun Sari dan Trijatmiko Wahyu Prabowo (2019)	Pengaruh akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di indonesia: Studi kasus pada pemerintah kabupaten Batang	Independen: Sistem pengendalian internall, kepatuhan terhadap ketentuan perundang- undangan. Dependen: Tingkat korupsi	Regresi Linear	Menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat menurunkan tingkat korupsi. Sedangkan kepatuhan peraturanperundang- undangan tidak mempengaruhi tingkat korupsi.
10.	Intan sengaji dan Nur Fadjrih Asyik (2018)	Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan kebijakan	Independen: Akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD, kebijakan desa	Regesi Linear Berganda	Hasil penelitia ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif

		desa terhadap pembangunan desa.	Dependen: pembangunan Desa		terhadap pembangunan desa.
--	--	---------------------------------	----------------------------	--	----------------------------

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian berada di Kantor Daerah Pemerintah Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada penelitian ini, penulis menetapkan sampel sebanyak 40 orang pegawai yang dijadikan sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan dilakukan dengan membagikan kuesioner yang berisi pernyataan yang akan dijawab oleh informan serta Penggunaan dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data dari sumber dokumen yang berasal dari Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Barru. Metode dokumentasi mencari data berupa pengambilan gambar saat pembagian kuesioner keadaan di Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Barru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perusahaan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretarias Daerah.

Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru 24 tahun 2022 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 24) Badan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Barru melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tugas pembantuan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Renstra BPKAD 2021- 2026 adalah Rencana Strategi yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Barru yang disusun sesuai tugas, wewenang & fungsi BPKAD Kabupaten Barru serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 dan merupakan dokumen *public* yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi Dan Misi Bupati Barru Periode 2021 – 2026.

Fungsi Renstra BPKAD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Barru merupakan dokumen yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Renstra BPKAD 2021-2026 berfungsi sebagai dokumen rujukan yang menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan Kabupaten Barru serta berfungsi sebagai dokumen rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD setiap tahun, yang dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dapat dicapai secara bertahap setiap tahun.

Proses penyusunan Renstra BPKAD dilakukan dengan melakukan orientasi mengenai Renstra BPKAD yang mencakup peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman teknis penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran. Dokumen rujukan

awal dalam menyusun rancangan Renstra BPKAD adalah RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh BPKAD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Barru maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi BPKAD.

Visi dan Misi Organisasi

Visi

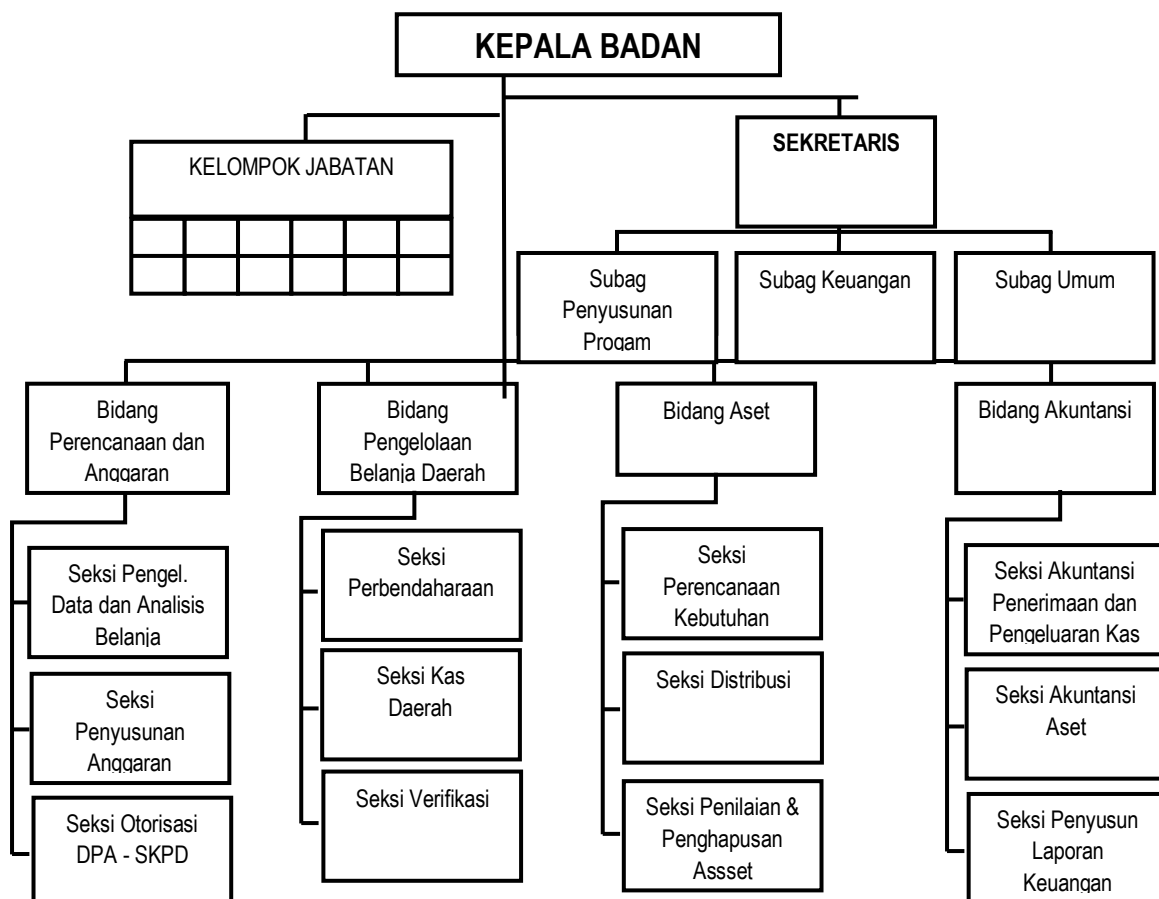
Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan

Misi

- Meningkatkan tertib Pengelolaan Aset Daerah Menurut Pedoman Pengelolaan Daerah.
- Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, akuntabel dan transparan.

Struktur Organisasi dan Job Description

a) Struktur Organisasi



PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

b) Job Description

1) Sekretariat / Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Melakukan koordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan, baik dalam satuan organisasi dinas maupun dalam lembaga antar dinas/perangkat daerah lainnya.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengkoordinasian Penyusunan program;
- b) Pengelolaan Keuangan;
- c) Pelayanan Administrasi yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2) Bidang Perencanaan dan Anggaran

Bidang Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang perencanaan dan anggaran.

Bidang Perencanaan dan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan anggaran;
- b) Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perencanaan anggaran;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan anggaran; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

3) Bidang Pengelola Belanja Daerah

Bidang Pengelola Belanja Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pengelolaan belanja daerah.

Bidang Pengelola Belanja Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan belanja daerah;
- b) Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan belanja daerah;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan belanja daerah; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

4) Bidang Asset

Bidang Asset mempunyai tugas membantu kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Asset.

Bidang Asset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi;

- a) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang asset
- b) Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang asset;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang asset; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

5) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Akuntansi.

PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi;
- b) Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang akuntansi;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang akuntansi; dan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini sejenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data kualitatif yaitu data berupa pendapat responden dalam memberi jawaban pada sekunder. Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap 40 orang responden.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen berupa informasi tertulis yang ada hubungannya dengan variabel penelitian ini.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 40 responden. Berikut merupakan data responden berdasarkan jenis kelamin :

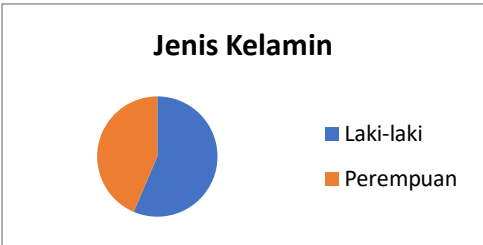
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	$\frac{22}{40} \times 100\%$	55%
Perempuan	$\frac{17}{40} \times 100\%$	42.5%
Total Responden	$\frac{40}{40} \times 100\%$	100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, memperlihatkan bahwa responden jenis kelamin laki-laki sebanyak 22 orang (55%), sedangkan responden jenis kelamin perempuan

sebanyak 17 orang (42.5%). Dengan demikian data disimpulkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak daripada jumlah responden perempuan.



Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Klasifikasi responden berikutnya ialah berdasarkan umur. Berikut ini merupakan data responden berdasarkan umur:

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Umur

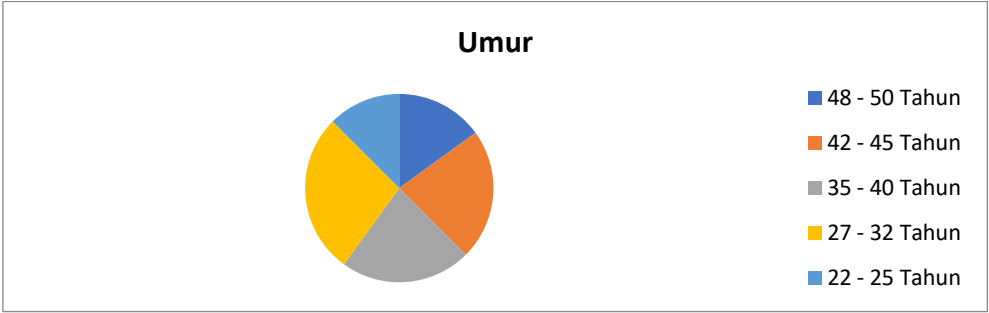
Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
48 - 50 Tahun	$\frac{6}{40} \times 100\%$	15%
42 – 45 Tahun	$\frac{9}{40} \times 100\%$	22.5%
35 – 40 Tahun	$\frac{9}{40} \times 100\%$	22.5%
27 – 32 Tahun	$\frac{11}{40} \times 100\%$	27.5%
22 – 25 Tahun	$\frac{5}{40} \times 100\%$	12.5%
Total Responden	$\frac{40}{40} \times 100\%$	100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, memperlihatkan bahwa responden berdasarkan umur 22-25 tahun sebanyak 5 orang (12.5%), responden umur 27-32

**PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BARRU**

tahun sebanyak 11 orang (27.5%), responden umur 35-40 tahun sebanyak 9 orang (22.5%), responden umur 42-45 tahun sebanyak 9 orang (22.5%), responden umur 48-50 tahun sebanyak 6 orang (15%).



Gambar 4.4 Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Klasifikasi responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Berikut ini merupakan tabel data responden berdasarkan pendidikan terakhir:

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
S2	$\frac{10}{40} \times 100\%$	25%
S1	$\frac{23}{40} \times 100\%$	57.5%
SMA	$\frac{7}{40} \times 100\%$	17.5%
Total Responden	$\frac{40}{40} \times 100\%$	100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan data di atas, memperlihatkan bahwa klasifikasi responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu S2 sebanyak 10 orang (25%), responden

berdasarkan pendidikan terakhir S1 sebanyak 23 orang (57.5%), dan responden berdasarkan pendidikan terakhir SMA sebanyak 7 orang (17.5%).



Gambar 4.5 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Deskripsi Data Variabel Penelitian

Dari uraian mengenai kompetensi, sistem informasi yang dilakukan oleh tanggapan responden terhadap akuntabilitas keuangan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Frekuensi Jawaban Variabel Kompetensi (X1)

Frekuensi jawaban responden pada variabel kompetensi disajikan pada tabel 4.5. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dsitribusi frekuensi variabel kompetensi terdiri dari 6 pernyataan. Jika dilihat dari hasil analisis diketahui bahwa yang memiliki mean tertinggi yaitu X1.2 dengan angka **4.58%**, sedangkan yang memiliki mean terendah yaitu X1.5 dengan angka **4.23%**.

Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Responden Variabel Kompetensi (X1)

Indikator	Skala Pengukuran												Mean
	1 (STS)		2 (TS)		3 (KS)		4 (S)		5 (SS)		Jumlah		
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	
X.1	0	0	0	0	9	22.5%	7	17.5%	24	60.0%	40	100.0%	4.38%
X.2	0	0	0	0	5	12.5%	7	17.5%	28	70.0%	40	100.0%	4.58%
X.3	0	0	1	2.5%	8	20.0%	11	27.5%	20	50.0%	40	100.0%	4.25%
X.4	0	0	0	0	7	17.5%	14	35.0%	19	47.5%	40	100.0%	4.30%
X.5	0	0	1	2.5%	8	20.0%	12	30.0%	19	47.5%	40	100.0%	4.23%
X.6	0	0	0	0	4	10.0%	11	27.5%	25	62.5%	40	100.0%	4.53%
Rata-rata													4.37%

PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

Sumber : Data diolah, 2023

2. Frekuensi Jawaban Variabel Sistem Informasi (X2)

Frekuensi jawaban responden pada variabel sistem informasi pada tabel 4.6. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi sistem informasi terdiri dari 8 pernyataan. Jika dilihat dari hasil analisis diketahui bahwa yang memiliki mean tertinggi yaitu X2.6 dengan angka **4.25%**, sedangkan yang memiliki mean terendah yaitu X2.8 dengan angka **4.03%**.

Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Responden Sistem Informasi (X2)

Indikator	Skala Pengukuran												Mean
	1 (STS)		2 (TS)		3 (KS)		4 (S)		5 (SS)		Persen (%)		
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	
X2.1	0	0	0	0	8	20.0%	16	40.0%	16	40.0%	40	100.0%	4.20%
X2.2	0	0	1	2.5%	3	7.5%	26	65.0%	10	25.0%	40	100.0%	4.13%
X2.3	0	0	0	0	2	5.0%	27	67.5%	11	27.5%	40	100.0%	4.23%
X2.4	0	0	1	2.5%	2	5.0%	27	67.5%	10	25.0%	40	100.0%	4.15%
X2.5	0	0	0	0	7	17.5%	19	47.5%	14	35.0%	40	100.0%	4.18%
X2.6	0	0	0	0	2	5.0%	26	65.0%	12	30.0%	40	100.0%	4.25%
X2.7	0	0	1	2.5%	6	15.0%	19	47.5%	14	35.0%	40	100.0%	4.15%
X2.8	0	0	0	0	8	20.0%	23	57.5%	9	22.5%	40	100.0%	4.03%
Rata-rata													4.16%

Sumber : Data diolah, 2023

3. Frekuensi Jawaban Variabel Akuntabilitas Keuangan (Y)

Frekuensi jawaban responden pada variabel akuntabilitas keuangan pada tabel 4.7. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi akuntabilitas keuangan terdiri dari 8 pernyataan. Jika dilihat dari hasil analisis diketahui bahwa yang memiliki mean tertinggi yaitu Y.6 dengan angka **4.33%**, sedangkan yang memiliki mean terendah yaitu Y.2 dengan angka **4.13%** dan Y.7 dengan angka **4.13%**.

Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas Keuangan (Y)

Indikator	Skala Pengukuran												Mean
	1 (STS)		2 (TS)		3 (KS)		4 (S)		5 (SS)		Persen (%)		
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	
Y.1	0	0	0	0	7	17.5%	17	42.5%	16	40.0%	40	100.0%	4.23%
Y.2	0	0	1	2.5%	3	7.5%	26	65.0%	10	25.0%	40	100.0%	4.13%
Y.3	0	0	0	0	2	5.0%	27	67.5%	11	27.5%	40	100.0%	4.23%
Y.4	0	0	1	2.5%	2	5.0%	27	67.5%	10	25.0%	40	100.0%	4.15%
Y.5	0	0	0	0	7	17.5%	20	50.0%	13	32.5%	40	100.0%	4.15%
Y.6	0	0	0	0	1	2.5%	25	62.5%	14	35.0%	40	100.0%	4.33%
Y.7	0	0	2	5.0%	6	15.0%	17	42.5%	15	37.5%	40	100.0%	4.13%
Y.8	0	0	1	2.5%	5	12.5%	21	52.5%	13	32.5%	40	100.0%	4.15%
Rata-rata													4.18%

Sumber : Data diolah, 2023

PEMBAHASAN PENELITIAN

Menurut Moekijat, (1887) dalam Sedarmayanti (2017:21) kompetensi adalah gambaran kesanggupan yang telah ada untuk melaksanakan bermacam-macam tugas yang diperlukan oleh suatu pekerjaan tertentu, berupa keterampilan dan kecakapan yang dimiliki oleh seorang individu, sehingga orang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan bermacam-macam tugas yang diperlukan dalam suatu pekerjaan tertentu.

Menurut (Hakim, 2019), sistem informasi adalah sebuah mesin atau sistem manusia yang menyediakan informasi untuk mendukung aktivitas manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Sistem informasi juga dapat didefinisikan sebagai manajemen dalam mengumpulkan data dan menyajikan informasi yang mendasari keputusan perusahaan.

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2010) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil penelitian ini mengambil sampel sebanyak 40 responden dari kuesioner yang disebar yang terdiri dari 22 orang responden laki-laki dan 17 orang responden perempuan. Berdasarkan data di atas maka mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

Frekuensi jawaban variabel X1 memiliki rata-rata (mean) nilai sebesar 4.37%, yang tertinggi adalah pernyataan X1.2 yaitu sebesar 4.58%, dan yang terendah adalah item pernyataan X1.5 sebesar 4.23%.

Berdasarkan hasil analisis untuk variabel kompetensi menunjukkan bahwa uji t menghasilkan nilai thitung $3.260 > ttabel 1.687$ dan nilai sig. $0.002 < 0.05$. Hal ini berarti variabel kompetensi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan Daerah Kabupaten Barru.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko Setyanto Dan Hamzah Ritchi (2018), dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, kualitas software sistem informasi akuntansi, penerapan pengendalian intern berpengaruh terhadap semua variabel independen secara simultan dengan akuntabilitas keuangan termasuk dalam kriteria hubungan sangat kuat.

Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil penelitian ini mengambil sampel sebanyak 40 responden dari kuesioner yang disebar yang terdiri dari 22 orang responden laki-laki dan 17 orang responden perempuan. Berdasarkan data di atas maka mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

Frekuensi jawaban variabel X2 memiliki rata-rata (mean) nilai sebesar 4.16%, yang tertinggi adalah pernyataan X2.6 yaitu sebesar 4.25%, dan yang terendah adalah item pernyataan X2.8 sebesar 4.03%.

Berdasarkan hasil analisis untuk variabel sistem informasi menunjukkan bahwa uji t menghasilkan nilai thitung $9.722 > ttabel 1.687$ dan nilai sig. $0.000 < 0.05$. Hal ini berarti variabel sistem informasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan Daerah Kabupaten Barru.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alwina Noviana dan Decky Hendarsyah (2020), dengan judul “Ketetapan waktu pelaporan

keuangan: Sistem pengendalian internal dan sistem informasi pengelolaan Keuangan daerah”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara persial dan simultan Sistem pengendalian internal dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap ketetapan waktu pelaporan keuangan pada dinas perhubungan kabupaten bengkalis.

KESIMPULAN

Kesimpulan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan sistem informassi terhadap akuntabilitas keuangan Daerah Kabupaten Barru. Berdasarkan analisis data serta pembahasan maka dapat ditarik keismpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis membuktikan terdapat pengaruh antara Kompetensi terhadap akuntabiliitas keuangan Daerah Kabupaten Barru. Dilihat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai koefiesien sebesar 0.490 dant hitung sebesar 3.260 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0.002 lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Barru.
2. Hasil pengujian hipotesis membuktikan terdapat pengaruh antara Sistem Informasi terhadap akuntabiliitas keuangan Daerah Kabupaten Barru. Dilihat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai koefiesien sebesar 0.794 dant hitung sebesar 9.722 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Barru.

DAFTAR REFERENSI

- Alnur, W. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. JOM FEKON. Volume I; (12-16)
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarata: BPFE Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Christy, N., & Heni, K. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan

PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

- Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. E-journal UAJY.
- Fathia, Nurul. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Fauziyah, R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan.
- Frans, J. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, L. (2019). Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Informasi Manajemen: Dilengkapi Teori Dasar Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. In Timur Laut Aksara I ISBN : 978-602-53849-2-9 (Issue i). [http://repository.uinjambi.ac.id/390/1/FINAL MATERI BUKU SIM.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/390/1/FINAL%20MATERI%20BUKU%20SIM.pdf)
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2008. Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN
- Halim, Abdul. 2013. Analisis Investasi. Jakarta: Salemba Empat
- Hehanussa, S. J. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. Skripsi. Universitas Kristen Indonesia.
- Jensen & Meckling. 1976. The Theory of The Firm: *Manajerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure*, Journal of Financial and Economics
- Lewier, J., & Kurniawan, H. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. E-journal.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: CV. Andi

Ofset

- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume II; (1-17)
- Nugraha, Darya. 2011. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Aset Tetap Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Cimahi), Jurnal Sigma-Mu. Volume III; No.1 – Maret 2011)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerinta No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Prahara, Persia. 2014. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan. Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pramularso, Eigis Yani. 2018. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan CV Inaura Anugerah Jakarta. Widya Cipta, Vol II, No. I :Hal 40-46
- Purnamasari, & Handayani. 2015. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama.
- Putri. (2017). Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjung Balai
- Rahmadani, R. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah serta Dampaknya terhadap Akuntabilitas Keuangan. Journal Uinjkt.
- Rahmi, A., Agusti, R., & Wiguna, M. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan, dan Aktivitas Pengendalian

PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

(<https://media.neliti.com>), diakses 11 Februari 2017)

- Ratih, Asri Eka. 2012. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tesis. Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Sari, Diana. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Procceding.
- Sastra, Yuni. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan. Skripsi. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Sedarmayanti. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Refika Aditama
- Sholeh, M., & Wahyudin, D. (2012). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Dan Kompetensi Terhadap Efektifitas Kerja Di Pt Citra Solusi Informatika. 3(1), 28-41. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Sinaga, D. 2005. Pengantar Manjaemen Keuangan. Yogyakarta: CV. Andi Ofsett Soleha, N. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten. Jurnal Etikonomi. Volume XIII; (22-24)
- Sinaga, D. S., Sinaga, J., & ... (2020). Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan... *Jurnal Global*, 9, 11-19. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/global/article/view/601>
- Somad, A. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Alfabeta, 2017.

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 103 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Vince, R., & Rheny, H. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau. 2; (1–16)

Wahyuni, P. S., Luh, N., Erni, G., & Trisna, N. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. E-jurnal Undiksha. Volume II; (1).

Warisno. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Tesis. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.